

PERAN PEMBANGUNAN PESANTREN BERBASIS AGROBISNIS TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Alvin Arifin

(Alumni Sosiologi UIN SGD Bandung, alvinarifin35@gmail.com)

Abstract:

This study discusses the role of pesantren in village community development through agribusiness activities. The method used in this study is a descriptive method which is a type of qualitative data to describe, analyze, and disclose events that occurred in Al Ittifaq Islamic boarding school, Alamendah Village. Data is generated based on primary data collection from students and administrators of Al Ittifaq Islamic boarding school and Alamendah village community by direct observation of the authors directly involved with activities in Islamic boarding schools, semi-structured interviews or in-depth interviews, and documentation. The results showed that community development carried out by the pesantren did not only focus on the results achieved but on the process. The four steps for formulating community development programs are, engagement, assessment, action and facilitation, and evaluation and termination or reformation. The results achieved by community development in Alamendah Village through pesantren based on agribusiness are the increasing quality of life of the community.

Keywords: *Community Development, Islamic Boarding School, Agribusiness*

I. PENDAHULUAN

Saat ini, kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan (*the age of development*). Zaman di saat suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga. Istilah pembangunan (*development*) kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua Negara, khususnya Dunia Ketiga.¹ Bahkan dewasa ini aneka ragam pendekatan pembangunan banyak dimunculkan sebagai pemikiran untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Pada tanggal 27 september 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

mendeklarasikan suatu rencana pembangunan global yang terkenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan alias *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Deklarasi itu menandai dimulainya suatu masa pembangunan baru yang berjangka waktu 15 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.³

SDGs adalah sebuah proposal pembangunan bangsa-bangsa yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari proposal pembangunan terdahulu yang terkenal dengan nama *Millenium Development Goals (MDGs)* atau Tujuan Pembangunan Milenium. Proposal itu berisi tujuan-tujuan pembangunan dan target-target yang hendak dicapai, dalam mana tujuan-tujuan dan target-target itu merupakan tanggapan terhadap isu-isu krusial atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti isu

¹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 40

² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi*

Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Humaniora, Bandung, 2008, hlm. 11

³Dikutip dari <http://jpicsvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/> pada hari senin 24 oktober 2016 pada pukul 19.42 WIB.

kemiskinan, kematian ibu dan bayi, air dan kebersihan, dan yang lainnya.

Jeffrey D Sachs, memberikan empat (4) alasan utama mengenai pentingnya memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Pertama*, Tujuan Penting untuk Mobilisasi Sosial. Dalam dunia yang hiruk pikuk dewasa ini, kesepakatan mengenai suatu tujuan global bersama akan membantu individu, lembaga dan pemerintah di seluruh dunia untuk menyepakati arah pembangunan pada intinya, berfokus pada hal-hal yang betul-betul bermanfaat bagi masa depan kita. Adanya tujuan bersama membantu mengarahkan semua pihak untuk fokus pada hal yang sama, memobilisasi semua daya dan menjadikan lebih mudah diatur dan diterapkan sehingga semua pihak dapat melangkah bersama menuju pencapaian yang mereka harapkan.

Kedua, Tujuan bersama memberikan kekuatan menekan yang bersahabat. Dengan memiliki tujuan bersama setiap kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang diambil oleh setiap kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang diambil oleh setiap pemimpin bangsa akan selalu diuji oleh publik, baik dengan mempertanyakannya di ruang-ruang pertemuan tertutup. Artinya, tujuan bersama memberikan kesempatan bersama kepada semua elemen masyarakat untuk mengontrol seluruh proses pembangunan, agar tetap setia pada jalan menuju pencapaian bersama.

Ketiga, tujuan bersama memacu kekuatan komunitas epistemik atau komunitas ilmu pengetahuan. Artinya tujuan bersama mendorong pengerahan semua jaringan keahlian, pengetahuan dan praktek untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, tujuan bersama memobilisasi semua jaringan pemangku kepentingan. Pemimpin masyarakat, politisi, kementerian, komunitas ilmiah, lembaga swadaya masyarakat yang terkemuka,

kelompok agama, lembaga internasional, lembaga donor, dan yayasan. Semuanya akan terdorong untuk bergabung ke dalam tujuan bersama. Proses *multi-stakeholder* ini sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks dalam pembangunan berkelanjutan dan upaya melawan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit.⁴

Adapun Tujuan dan Target SDGs setelah menyelesaikan 15 tahun pembangunan global dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam “Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)”. Bangsa-bangsa di dunia yang bergabung dalam PBB, menyadari bahwa banyak hal yang telah dicapai selama 15 tahun, namun masih banyak hal yang belum dicapai karena berbagai kesulitan dan tantangan. Karena itu para pemimpin bangsa sepakat untuk melanjutkan pembangunan global yang sedang dilaksanakan untuk mempertahankan hasil-hasil yang sudah dicapai dan menyempurnakan serta melengkapi tujuan-tujuan pembangunan global yang harus dicapai. Kesepakatan mengenai hal itu terulang dalam dokumen SDGs. Jika dalam MDGs hanya 8 tujuan pembangunan global, maka dalam SDGs terdapat 17 tujuan dan 16 target pembangunan global yang perlu dicapai selama 15 tahun kedepan, terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2030.

Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimaksud adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk; Tujuan ini memiliki 7 target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030. Isu pokok dalam tujuan ini adalah kemiskinan dan penolakan terhadap kehidupan yang bermartabat.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan; Tujuan ini juga memiliki 8 target yang harus dicapai, yang semuanya merupakan

⁴ Dikutip dari Jeffrey Sachs, <http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-goals-shift-byjeffrey-d-sachs-2015-03/indonesia>The

End Of Poverty.co., diakses pada tanggal 24 oktober 2016 pada pukul 20.00 WIB.

- tanggapan terhadap isu kelaparan dan ketahanan pangan.
3. Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua pada segala usia; ada 13 target yang harus dicapai untuk menjawab masalah kesehatan dan hidup yang lebih baik bagi semua usia.
 4. Memastikan pendidikan inklusif dan kualitas yang sederajat dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; pendidikan dan kesempatan belajar yang sama bagi semua individu merupakan isu utama, yang dapat diatasi dengan merealisasikan 10 target yang harus dicapai.
 5. Menghasilkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak gadis; dengan mengusung kesetaraan gender, perempuan dan anak sebagai isu pokok, SDGs mau merealisasikan 9 target pembangunan yang harus dicapai.
 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan dari air dan sanitasi (kebersihan dan kesehatan) bagi semua; 8 target.
 7. Memastikan akses terhadap energi modern yang terjangkau, berkecukupan dan berkelanjutan bagi semua; Tujuan ini akan dicapai melalui pemenuhan terhadap 5 target pemenuhan utama.
 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak semua; Tujuan ini memiliki 10 target yang harus dicapai selama 12 tahun ke depan.
 9. Membangun infrastruktur yang berdaya tahan, memajukan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mengupayakan inovasi; memiliki 8 target yang harus dicapai.
 10. Mengurangi kesenjangan dalam antar Negara; ada 10 target yang harus dicapai.
 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan; memiliki 10 target yang harus dicapai.
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; mempunyai 11 target.
 13. Mengambil tindakan penting dan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; hanya 5 target yang harus dicapai.
 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya, sumber daya samudra, laut dan perairan untuk pembangunan berkelanjutan; memiliki 10 target yang harus dicapai.
 15. Melindungi, memulihkan dan memajukan penggunaan ekosistem bumi, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati; mempunyai 12 target yang harus dicapai.
 16. Memajukan masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses bagi keadilan dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusi pada semua tingkatan; memiliki 12 target yang harus dicapai.
 17. Memperkuat sarana implementasi dan revitalisasi kemitraan global bagi pembangunan berkelanjutan; memiliki 19 target yang harus dicapai.⁵
- Tujuan dan target pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan hasil kesepakatan para pemimpin bangsa-bangsa

⁵Dikutip dari <http://jpicsvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/> pada hari senin 24 oktober 2016 pada pukul 20.37 WIB.

dunia, termasuk Indonesia. Artinya, Tujuan dan target pembangunan tersebut memiliki relevansi dengan pembangunan di Indonesia. Artinya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia juga sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastrukural dalam meningkatkan produksi (prinsip produktivitas), pada kenyataannya telah gagal mewujudkan *trickle down effect development*, dan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mengarah pada permasalahan politik. Kegagalan tersebut mengilhami timbulnya paradigam kesejahteraan, yang menjanjikan kesejahteraan dan keadilan, serta cenderung memandang rakyat sebagai objek alamiah melalui *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, pengasuhan dan *proteksi*.⁶

Dalam kenyataannya, pada pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada pemerintah dalam melindungi, menyelamatkan, dan menyejahterakan kehidupan mereka. Hal ini akan memperlemah daya juang rakyat dalam memecahkan permasalahannya ataupun menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman bahasa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sampai akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I, jelas bahwa

pelaksanaan pembangunan tersebut cenderung bersifat normatif dan seragam serta kurang mengungkapkan variasi lokal yang memanifestasikan orisinalitas dan kepentingan atau kehidupan penduduk setempat. Kecenderungan ini mengalihkan perhatian dari masalah-masalah real masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, produktivitas yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja dan sebagainya. Dampak dari pandangan tersebut pada akhir pembangunan panjang (PJP) I terlihat bahwa setelah selama 25 tahun pemerintah melaksanakan pembangunan, masih ada masyarakat yang tertinggal atau tergolong masyarakat miskin.

Sebagai konsekuensinya, munculah paradigma atau strategi pembangunan desa terpadu (*integrated rural development*), yang memberikan tekanan pada aktivitas multisektoral, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), partisipasi lokal, dan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan permasalahan pembangunan bersifat multidimensi atau sangat kompleks, yang mencakup budaya, politik, sosial, teknikal, dan dimensi lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ruttan:

“bahwa pembangunan pada dasarnya melibatkan interaksi dalam sejumlah besar antarmubungan aktivitas yang diwujudkan dalam implementasi program yang terpadu, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan secara tepat”.⁷

Dengan kata lain, pembangunan terpadu berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan, dengan melihat berbagai dimensi, baik kekuatan maupun kelemahannya, seperti budaya, sosial, politik, kelembagaan, potensi, kemampuan, dan lainnya, dengan menumbuhkan kekuatan rakyat melalui partisipasi lokal dalam membicarakan, merumuskan, dan merencanakan yang bersumber dari bawah. Dengan kata lain, rakyat menentukan hal

⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 20

⁷ *Ibid.*, hlm. 21

yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.⁸

Community development adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat sendiri. Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki sehingga pada tahap tertentu, berbagai aktivitas tersebut membutuhkan pelembagaan dalam institusi yang lebih formal. Bekerja bersama masyarakat (*working with people*) dan menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*) adalah prinsip utama dalam penerapan metode ini.⁹

Community development tidaklah bersifat statis dan hanya bersifat lokal saja. *Community development* bisa melibatkan interaksi dinamis dan partisipatoris antar beragam *stakeholders*, termasuk “pihak luar” (pemerintah, donor, pendamping) dan warga setempat. Dengan demikian, *community development* tidak harus terjebak pada dikotomi “*bottom-up versus top-down planning*”, maupun “*local development versus global development*”. Kegagalan *community development* sering terjadi akibat adanya bias-bias dalam *community development*. Peran pendampingan dan kapasitas pendamping menjadi sangat sentral dalam menentukan keberhasilan *community development*, khususnya pada masyarakat daerah tertinggal.¹⁰

Masyarakat desa kini sudah mengalami perkembangan, akses media sosial sudah bukan barang langka lagi dimasyarakat. Keberagaman kebutuhan menjadikan masyarakat desa lebih dinamis lagi. Munculnya keorganisasian di masyarakat maupun koperasi desa di

masyarakat menjadi penting sebagai sektor informal untuk menyalurkan keinginan masyarakat. Apalagi sekarang didukung oleh anggaran dana desa (ADD), lewat anggaran tersebut masyarakat akan lebih diberdayakan lagi, karena pemerintah pusat mencanangkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis lokal.¹¹

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab, *funduq*, yang artinya hotel atau asrama. Ciri-ciri umum keseluruhan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang.¹²

Hal ini untuk membuktikan kepada setiap insan yang beragama bahwa agama Islam dengan ajaran-ajarannya telah mengandung ketentuan serta peraturan-peraturan untuk mengatur tata kehidupan manusia secara lengkap untuk kebahagiaan di dunia kini dan di akhirat nanti (*Manhajjul Qur’ani fi binail mutjama’i* – M. Syaltut: *Al Islam dinul mujtama’i waddinusysyu ‘unil ijtimai’iyah*).¹³

Pembangunan masyarakat di mana pun juga bukan semata-mata merupakan suatu bentuk usaha pemerintah, tetapi pada hakekatnya merupakan sikap dan sistem kerja baru untuk membina suatu masyarakat. Pembangunan masyarakat desa pada essensinya merupakan revolusi desa yang di dalamnya berlangsung dengan cepat dan teratur berencana proses-proses dinamisering dan demokratisering serta kemakmuran yang adil. Pembangunan masyarakat desa dalam analisisnya yang terakhir adalah suatu hasil

⁸*Ibid.*

⁹Huraerah, *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹⁰Edi Suharto, *CSR dan COMDEV; Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 66.

¹¹Mustari, M. and Rahman, M.T., 2010. *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress, hlm. 25.

¹²Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai masa Depan Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2011, hlm. 41.

¹³Salimuddin, *Studi Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan Analisis Manajemen Pesantren*, Pustaka Billah, Bandung, 2002, hlm. 73.

atau suatu keadaan yang ideal daripada desa, yaitu desa yang telah menjadi masyarakat (bergotong-royong) dan telah mampu untuk membangun diri (berswadaya).¹⁴

Menurut pendapat Sudjana mengatakan: “Perbuatan pembangunan masyarakat desa memcerminkan dua buah kekuatan; syarat mental dan syarat intelektual material. Mental didasari oleh moral dan agama, dan intelektual material didasari oleh ilmu pengetahuan”.¹⁵

Sedangkan menurut A.H. Nasution mengatakan: “Usaha pertama dalam perbaikan mental karena soal perbaikan ekonomi kita adalah soal mental. Mencerminkan urgensinya integrasi *planning* dakwah Islam dengan usaha-usaha pembangunan masyarakat desa”.¹⁶

Istilah pembangunan dalam pembangunan masyarakat desa bukanlah suatu proses selesai, tetapi suatu gerak yang terus menerus (*on going process*) yang berlangsung, suatu proses edukasi yang berjalan pada suatu masyarakat yang berswadaya. Maka titik utamanya adalah kegiatan jiwa.¹⁷

Pengertian masyarakat yaitu sekelompok manusia yang satu sama lain ada ikatan nasib dan pertanggung jawaban. Tetapi istilah masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa, tidak ditafsirkan terlampaui sempit seperti diatas, dengan hanya melihat masyarakat itu sebagai satuan sosial ekonomis. Istilah masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa dan istilah *community* dalam *community development* adalah hakekat dari pembangunan. Ini disebabkan oleh karena pembangunan masyarakat desa menurut partisipasi aktif dan maksimal dari masyarakat di mana pembangunan itu diusahakan. Dan oleh karena esensi dari segala tujuan pembangunan masyarakat desa adalah masyarakat desa yang membangun.¹⁸

Pengertian pembangunan masyarakat desa bukan merupakan pengetahuan yang

mempunyai kedudukan secara nasional dalam arti hanya terbatas pada lingkungan Negara Republik Indonesia saja, melainkan mempunyai latar belakang historis, sosial, ekonomis, kultural, spiritual. Pembangunan masyarakat desa adalah usaha secara sadar oleh masyarakat untuk mengadakan peralihan yang terus menerus daripada hidup dan kehidupannya, jasmaniah maupun rohaniah.

Suatu fakta yang telah dilihat dan dirasakan di desa-desa di seluruh tanah air Indonesia adalah tumbuhnya berbagai organisasi yang bersifat sosial politik ekonomis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membina pembangunan masyarakat disalurkan melalui koordinasi kerja agar tujuan baiknya tidak menyeleweng yang tentu akan menimbulkan perpecahan, *overlapping*, simpang siur, *overactivity*, sehingga gerakannya bukan untuk memperlancar pembangunan malah akan membingungkan, mengapatiskan dan mengecewakan masyarakat.

Sesuai dengan landasan hukumnya, pembangunan masyarakat desa berusaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi pendapatan. Ini menyangkut segi ekonomis, sedangkan ditentukan dasarnya swadaya masyarakat desa adalah sama artinya dengan swadaya gotong royong dan menyangkut segi sosial.¹⁹

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat (LM3), akan tetapi tidak berarti seluruh pondok pesantren termasuk LM3. Pondok pesantren sebagai LM3 sangat berpotensi dalam pengembangan ekonomi di pedesaan baik di bidang pertanian agroindustri/agrobisnis maupun di bidang lain seperti lembaga keuangan perdesaan, koperasi dan lain sebagainya.

Hasil studi dari 56 pondok pesantren di 7 Propinsi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press, hal. 43.

¹⁸ Salimuddin, *Studi Sosiologi*, hlm. 74

¹⁹ *Ibid.*

Litbang Pertanian pada tahun 1996/1997 mengungkapkan bahwa keberadaan pondok pesantren dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat adalah sangat beragam. Keberagaman ini dapat dikelompokkan menjadi, *pertama*, pondok pesantren yang hanya mengkhususkan diri sebagai lembaga pendidikan agama atau pendidikan umum dan da'wah. *Kedua*, pondok pesantren yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai tambahan sumber pendapatan dan kegiatan keterampilan atau ekstrakurikuler para santri. *Ketiga*, pondok pesantren yang menempatkan kegiatan ekonomi atau agrobisnis sebagai kegiatan utama dan pilar penunjang kelangsungan hidup pondok pesantren. Artinya, pondok pesantren memiliki kesiapan dan kesediaan yang tidak sama dalam kegiatannya dengan peran pondok pesantren sebagai wahana pengembangan agrobisnis di perdesaan.

Untuk mewujudkan peran pondok pesantren sebagai agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan dalam sisi ekonomi masyarakat sekitar, maka pondok pesantren secara internal haruslah mandiri dalam sisi ekonomi dan dapat mengelola secara optimal potensi yang dimiliki. Untuk mewujudkan peran pondok pesantren tersebut di atas, maka analisis dan identifikasi potensi, kendala, peluang serta pemilihan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam dan masyarakat sekitar sangat diperlukan. Sementara itu seperangkat kebijaksanaan atau program pemerintah tentang pengembangan agrobisnis melalui pondok pesantren perlu mendapat perhatian dan dimanfaatkan secara optimal. Program pemerintah ini telah dilengkapi dengan suatu organisasi Pembina, forum komunikasi pondok pesantren (Forkappi), dan kelompok kerja operasional (Pokjanal) mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dan bahkan sampai tingkat pondok pesantren. Lebih spesifik lagi, melalui SK. Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.-0210/6/97 telah

dikembangkan pondok pesantren sebagai pondok pesantren percontohan pengembangan agrobisnis.

Dalam upaya menyusun model pengembangan agrobisnis perdesaan di wilayah pondok pesantren, maka secara umum kebijaksanaan dan program pemerintah yang telah ada menjadi acuan. Namun karena keragaman yang ada, maka analisis spesifik lokasi adalah sangat diperlukan agar model pengembangan serta langkah-langkah operasional akan lebih menjamin keberhasilan.²⁰

Usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Dari segi skala usaha, ada yang berskala besar (seperti perusahaan perkebunan, industri minyak sawit, dan lain-lain), ada yang berskala menengah (Seperti beberapa agroindustri menengah dan perkebunan menengah), serta ada yang berskala kecil (seperti usaha-usaha tani dengan lahan di bawah 25 hektar dan berbagai industri skala rumah tangga). Namun, apabila dikaji dari jumlah usahanya, maka usaha berskala adalah yang paling banyak. Diperkirakan jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agrobisnis di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan sektor agrobisnis hendaknya terus dikembangkan dengan pendekatan sistem agrobisnis yang berorientasi pada komersialisasi usaha atau industri perdesaan dan pertanian rakyat yang modern.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara global bidang pertanian telah maju. Baik teknologi maupun sistem dan orientasinya, tetapi penerapannya masih sangat kurang, terutama di negara-negara dunia ketiga. Teknologi pertanian, melalui pengembangan bioteknologi dan bio proses, teknologi mesin dan peralatan pertanian, teknik kimia serta teknologi penunjang pertanian, seperti teknologi elektrik dan mikrochip, teknologi dirgantara, teknologi perhubungan dan telekomunikasi, dan lain-lain akan semakin nyata pengaruhnya bagi

²⁰ *Afkar* Jurnal Tiga Bulanan Cides, Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan,

CIDES, Edisi Vol. V. No 2, Jakarta, 1998, hlm. 104-106

pengembangan sektor agrobisnis, terutama untuk memasuki milenium ketiga.

Kemajuan lain dalam bidang agrobisnis ditandai dengan semakin menyempitnya spesialisasi fungsional dan semakin jelasnya pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi sistem agrobisnis. Usaha agrobisnis memiliki kecenderungan menuntut untuk dikembangkan menjadi usaha dengan orientasi bisnis atau keuntungan. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi konsep pengembangan berdasarkan sistem agrobisnis terpadu.

Fungsi-fungsi agrobisnis terdiri atas kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer (budi daya), pengolahan (agroindustri), dan pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian disusun menjadi suatu sistem, di mana fungsi-fungsi di atas menjadi subsistem dari sistem agrobisnis.²¹

Kampung Ciburial Rt. 02 Rw 10 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung terdapat Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang konsern di sektor pertanian atau agrobisnis. Yang terlibat dalam kegiatan agrobisnis adalah pengurus pondok pesantren, guru, santri dan masyarakat sekitar.

Tahun 1997, atas keberhasilan menembus pasar supermarket, pesantren ini dijadikan sebagai pondok pesantren percontohan pengembangan agrobisnis, yang seleksi penetapannya dilakukan tahun 1996 oleh Tim Antar Departemen (Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Induk Koperasi Pondok Pesantren) dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

Berkembang pesatnya kegiatan agrobisnis di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini menyebabkan banyak perusahaan swasta dan lembaga-lembaga memberikan bantuan permodalan dan latihan manajemen.

Tujuannya, untuk meningkatkan volume dan kualitas usahanya. Bantuan tersebut berdatangan sejak tahun 1993. Lembaga yang memberikan bantuan permodalan adalah PT. Telkom dan PT. Perkebunan Nasional VIII.

Berbagai pelatihan dan bimbingan manajemen pun diberikan, antara lain oleh Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Tingkat II kabupaten Bandung, Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, serta beberapa instansi. Sedangkan bantuan sarana dan prasarana diberikan oleh Pemerintah Daerah Tk.I dan Tk. II, terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian berupa bangunan Pusat Inkubator Agrobisnis dan Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Agama, PT. Perkebunan Nasional VIII dan juga instansi lain.

Keberhasilan pesantren agrobisnis Al Ittifaq ini menjadikan pesantren ini sebagai pusat pelatihan dan tempat kuliah kerja lapangan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan lain-lain.

Yayasan Al Ittifaq dibina oleh Fuad Affandi yang merangkap sebagai Pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Ketua Pengurus Kopontren. Keorganisasian pesantren dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang pendidikan dan sosial yang membutuhkan biaya pendidikan, termasuk beasiswa, bidang ini pula yang bertugas membantu masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
2. Bidang perekonomian yang bertugas menjalankan roda ekonomi pondok, bidang ini berpusat pada pondok pesantren.

Posisi Ketua Umum pengurus Kopontren dipegang langsung oleh Fuad Affandi. Manajer dipegang oleh Asep

²¹ E. Gumbara Sa'id dan A. Harizt Intan, *Manajemen Agrobisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 18-20.

Saifuddin, salah seorang Pembina Pondok Pesantren. Unit-unit usaha untuk mendukung kelompok tani terdiri dari unit pelayanan sarana produksi, unit produksi, unit pemasaran, unit pengendalian hama dan penyakit, unit kendaraan dan pemanfaatan hasil.

Tahun 1996, Kopontren Al Ittifaq resmi berbadan hukum koperasi. Sejak itu perkembangannya sangat pesat. Jumlah simpanan sukarela anggotanya misalnya, setiap minggu mencapai tidak kurang dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sampai saat ini, terdapat 9 (sembilan) kelompok tani yang merupakan pendukung utama Kopontren Al Ittifaq, yaitu:

1. Kelompok tani Alif
2. Kelompok tani Kiara
3. Kelompok tani Jampang Endah
4. Kelompok tani Tunggul Endah
5. Kelompok tani HMS (*Hasil Melak Sayur*)
6. Kelompok tani Tambaga Indah
7. Kelompok tani Yakuris
8. Kelompok tani Sae
9. Kelompok tani Baitunnajah

Khusus untuk kelompok tani Alif (Al-Ittifaq) yang terdiri dari guru dan santri, komoditi yang diusahakan tidak hanya komoditi sayuran, tapi juga peternakan sapi, domba, ayam hias, perikanan serta *homeindustry* garmen dan kerajinan tas. Santri di didik dan disiapkan tidak hanya belajar ilmu agama tetapi belajar juga keterampilan berwirausaha.

Khusus untuk pengelolaan agribisnis dilakukan melalui beberapa tahapan yang antara satu tahapan dengan lainnya saling terkait. Tahapan-tahapan dimaksud adalah (a) pemilihan komoditi, (b) perencanaan, (c) mengatur pola tanam, dan (d) pengorganisasian santri.

Masyarakat adalah suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Masyarakat saling berinteraksi dimulai dari orang yang terdekat baik secara keturunan

atau keluarga maupun karena hidup berdampingan karena tempat (geografis).

Masyarakat menurut istilah berasal dari bahasa Arab *syukara* yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau *masyarakat* yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang sebelumnya berasal dari bahasa Latin *socius* yang artinya kawan. Jadi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²²

Suatu masyarakat akan membentuk suatu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai sendiri.

Salah satu contoh organisasi masyarakat yaitu Pondok Pesantren. Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat (LM3), akan tetapi tidak berarti seluruh pondok pesantren termasuk LM3. Pondok pesantren sebagai LM3 sangat berpotensi dalam pengembangan ekonomi di pedesaan baik di bidang pertanian agroindustri/agrobisnis maupun di bidang lain seperti lembaga keuangan perdesaan, koperasi dan lain sebagainya.

Pengertian agrobisnis yang banyak digunakan di negara-negara Asia adalah konsep yang dikemukakan oleh Davis dan Golberg (1957), dan diperkenalkan di Thailand, Malaysia, dan Filipina sekitar decade 1960-an. Di Indonesia, agrobisnis baru diperkenalkan secara resmi pada tahun 1984 ketika didirikan Program Studi

²² Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 160

Agrobisnis di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan mulai populer pada awal dekade 1990-an dalam berbagai media massa nasional, forum-forum, dan diskusi-diskusi pakar. Dalam periode tersebut, pakar-pakar nasional, seperti Bungaran Saragih, The Kian Wie, dan lain-lain menyatakan bahwa pengembangan agrobisnis Indonesia harus menjadi prioritas dalam Pembangunan Nasional jangka panjang Tahap II.

Definisi agrobisnis yang dikemukakan oleh David dan Golberg yaitu : “memberikan suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang pertanian modern menghadapi millennium ketiga. Agrobisnis yang merupakan suatu sistem, bila akan dikembangkan harus terpadu dan selaras dengan semua subsistem yang ada di dalamnya”.²³

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.²⁴ Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan.

Agen pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya *community development* untuk mencapai sasaran yang diinginkan. *Community development* seringkali didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. *Community development* mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti *community development*.²⁵

Community development tidak melihat masyarakat sebagai objek.

Melainkan subjek dan juga berfokus pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Empat langkah yang bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program *community development* adalah *Engagement, Assesment, Action and Facilititation*, dan *Evaluation and Termination or Reformation*.²⁶

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat diharapkan adanya suatu perubahan-perubahan baik sosial maupun ekonomi, tentunya pesantren harus memperhatikan tahapan *community development*, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu menurut teori Talcot Parson suatu perubahan merupakan gejala sosial dengan adanya tiga kemungkinan yaitu, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datangnya dari luar, pertumbuhan melalui diferensiasi struktural dan fungsional serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat.²⁷

Pembahasan teori struktural fungsional Parson diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem. Teori AGIL dikembangkan dalam bukunya yaitu *The Social System* yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan sistem sosial.

Menurut Parson ada empat fungsi penting yang dibutuhkan bagi semua sistem sosial, yaitu *Adaptation* (A), pencapaian tujuan atau *Goal Attainment* (G), mengatur dan menjaga atau *Integration* (I), dan memelihara atau memperbaiki pola-pola individu atau *Latency* (L).

Parson menggunakan empat skema itu karena beberapa alasan. Pertama, adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan

²³E. Gumbara Sa'id dan A. Harizt Intan, *Op. Cit.*, hlm. 20

²⁴ Deddy Supriady Bratakusumah & Riyadi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 43

²⁵Suharto, *op. cit.*, hlm. 67.

²⁶*Ibid.*, hlm. 93-94.

²⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12

fungsi pencapaian tujuan difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan mengarahkan sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan sistem kultural. Sistem kultural yaitu upaya menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.²⁸

Dalam perannya agar terlihat baik di masyarakat, pesantren memerlukan teori struktur fungsional yang dikemukakan oleh Parson. Pertama adalah adaptasi dimana pesantren harus beradaptasi dengan lingkungan dan perannya, kemudian tujuan yang hendak dicapai pesantren agar mendapat nilai baik dan dapat mencapai hasil atau tujuan yang memuaskan. Kemudian pesantren harus berintegrasi pada masyarakat agar segala apapun program dari pesantren ke masyarakat mendapat respon dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah latensi atau pemeliharaan agar pesantren dapat terpelihara dan dicintai masyarakat.

Kegiatan agrobisnis di Indonesia sudah ada sejak sebelum adanya Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Akan tetapi, pada waktu itu kegiatan utamanya adalah Agrobisnis usahatani, yang lebih dikenal dengan istilah pertanian.

Dalam PJP I, kegiatan pertanian semakin maju sehingga mampu mendorong agroindustri dan perdagangan. Hal ini seolah-olah agroindustri dan perdagangan menyesuaikan diri dengan pertanian. Sedangkan dalam PJP II keadaannya berbeda, yaitu agroindustri dan perdagangan ini dihadapkan akan mengubah pertanian sehingga pertanian menyesuaikan diri pada agroindustri dan perdagangan. Lambat laun, pertanian akan menyesuaikan pasar dan inilah visi pertanian masa depan.

Dalam PJP I, ujung tombak pengembangan agrobisnis adalah usahatani, sedangkan dalam PJP II ujung tombaknya adalah non usaha tani, yaitu agroindustri dan perdagangan. Pada saat sekarang posisi

antara usahatani dan nonusahatani seimbang (50%, 50%). Jadi, agroindustri dan perdagangan sebagai ujung tombak pengembangan agrobisnis masih dalam tanap belajar. Nantinya diharapkan akan ada perubahan dari basis usahatani ke basis non usaha tani, terutama agroindustri dan perdagangan.²⁹

Pada tahap PJP I lebih menekankan untuk menjual dan memproses apa yang dihasilkan. Jadi, hanya produksi yang dikembangkan. Pada tahap PJP II kegiatannya memproduksi untuk dapat dijual, yaitu produksinya menyesuaikan dengan permintaan industri dan agroindustri. Ini menunjukkan adanya suatu perubahan yang besar. Sebelumnya Departemen Pertanian (Deptan) yang memimpin dalam kegiatan produksi pertanian maka nanti perindustrian dan perdagangan yang memimpin.³⁰

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut telah berkembang di Indonesia yang merupakan salah satu subsistem agrobisnis. Pendalaman masa lalu membuktikan bahwa pembangunan pertanian saja yang tidak disertai dengan pembangunan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan, tidak mampu mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).³¹

Meskipun Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen terbesar beberapa komoditi pertanian dunia, tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar Internasional. Selain itu, nilai tambah (*value added*) yang kita raih dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relative kecil sehingga tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi

²⁸ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 67

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dalam rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agrobisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan.³²

Pembangunan sistem agrobisnis tersebut perlu ditempatkan bukan sebagai pendekatan baru pembangunan, tetapi lebih dari itu, pembangunan sistem Agrobisnis perlu dijadikan penggerak utama (*grand strategy*) pembangunan Indonesia secara keseluruhan (*agribusiness led development*). Hal ini didasarkan karena alasan berikut.

1. Amanat konstitusi dan landasan politis Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas konstitusi UUD 1945, harus mendasarkan pembangunannya, termasuk pembangunan ekonomi pada amanat konstitusi dasar. Dalam bidang ekonomi, pasal 33 UUD 1945, mengamanatkan bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yakni pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sumber daya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia adalah sumber daya manusia (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai, dan sebagainya) dan sumber daya alam (lahan, keanekaragaman hayati, agroklimat tropis, dan sebagainya). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berbasis pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hanya dengan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dimungkinkan jumlah penduduk, keanekaragaman sosial budaya masyarakat dan sumber daya alam menjadi subjek dan modal pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, tidak berarti mengesampingkan pemanfaatan sumber daya modal (*capital*) dan teknologi, serta manajemen modern. Modal, teknologi, dan manajemen modern sangat diperlukan, tetapi dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam melalui pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya impor juga tetap diperlukan, tetapi penggunaannya harus hati-hati dan disesuaikan dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam domestik.

2. Sektor pertanian memberi sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
3. Sektor pertanian merupakan sebagian besar mata pencaharian pendukung Indonesia.
4. Sektor pertanian mampu menyediakan keragaman menu pangan, karenanya sektor pertanian sangat memengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.
5. Sektor pertanian mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir.
6. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang devisa negara.³³

Data menunjukkan bahwa kontribusi sistem agrobisnis dalam PDB mencapai sekitar 48%, dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 77%, dan dalam total ekspor menyumbang 50% atau hampir 80% dari nilai ekspor non migas.

Bagi Indonesia, agrobisnis berkembang dan berprospek cerah karena kondisi wilayah yang menguntungkan, antara lain sebagai berikut.

1. Lokasinya di garis khatulistiwa yang menyebabkan adanya sinar matahari yang cukup bagi perkembangan sektor budi daya pertanian.
2. Kondisi lahan yang relative subur.

³²*Ibid.*, hlm. 15

³³*Ibid.*, hlm. 16

3. Lokasi Indonesia berada di luar zona angin taufan seperti yang banyak menimpa Filipina, Taiwan, dan Jepang.
4. Keadaan sarana dan prasarana seperti daerah aliran sungai, tersedianya bendungan irigasi, jalan di pedesaan yang relative baik, mendukung berkembangnya agrobisnis.
5. Adanya kemauan politik pemerintah yang masih menempatkan sector pertanian menjadi sektor andalan.³⁴

Hambatan dalam pengembangan agrobisnis di Indonesia terletak pada berbagai aspek, antara lain sebagai berikut.

1. Pola produksi beberapa komoditi pertanian tertentu terletak di lokasi yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan pembinaan dan menyulitkan tercapainya efisiensi pada skala usaha tertentu.
2. Sarana dan prasarana, khususnya yang ada di luar Jawa terasa belum memadai sehingga menyulitkan untuk mencapai efisiensi usaha pertanian.
3. Akibat poin 2 dan kondisi negara yang terdiri dari banyak pulau, biaya transportasi menjadi lebih tinggi.
4. Sering dijumpai adanya pemusatan agroindustry yang terpusat di kota-kota besar sehingga nilai bahan baku pertanian menjadi lebih mahal untuk mencapai lokasi agrobisnis tersebut.
5. Sistem kelembagaan, terutama di pedesaan terasa masih lemah sehingga kondisi seperti ini kurang mendukung berkembangnya agrobisnis. Akibat dari lemahnya kelembagaan ini dapat dilihat dari berfluktuasinya produksi dan harga komoditi pertanian.

Konflik tentang masalah efisiensi inilah yang menyebabkan pembahasan Agrobisnis tetap menarik. Masalahnya bukan saja terletak pada aspek produksi, pengolahan hasil dan pemasaran saja, tetapi juga pengaruh yang lain. Dengan adanya persaingan yang ketat tentang pemasaran hasil pertanian di pasar dunia (*world market*),

menuntut peranan kualitas produk dan kemampuan menerobos pasar dunia menjadi semakin penting. Kemampuan mengantisipasi pasar (*market intelligent*) pun menjadi amat penting, untuk itu bentuk usaha yang skala kecil perlu digabung dalam skala usaha yang lebih besar agar mampu bersaing di pasaran internasional. Untuk menjaga kelangsungan kemampuan menerobos pasar ini, kontinuitas bahan baku pertanian perlu dijamin, bukan saja dalam jumlah bahan baku yang diperlukan, tetapi juga kualitas dan kontinuitasnya.³⁵

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya serta diiringi dengan interpretasi rasional. Caranya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian.³⁶ Dalam penelitian ini meneliti masalah yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta yaitu *community development* desa Alamendah melalui pesantren berbasis agrobisnis.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara utuh dengan cara deskriptif yang dimaksudkan penggambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang tengah berlangsung.³⁷ Subyek penelitian ini adalah suatu organisasi, atau komunitas, lembaga. Dalam penelitian ini kajian yang di ambil adalah di Pondok Pesantren Agrobisnis.

Dengan metode dan pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap berbagai

³⁴*Ibid.*, hlm. 16

³⁵*Ibid.*, hlm. 17

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 63-64

³⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6

masalah dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, di Pondok Pesantren Al Ittifaq di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Hal ini terutama ditujukan untuk dapat menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang tengah berlangsung yang berkaitan dengan *community development* di Desa Alamendah melalui Pesantren Al Ittifaq yang berbasis agrobisnis. Demikian sehingga dapat diketahui latar belakang berdirinya Pesantren Al Ittifaq yang berbasis agrobisnis, program dan pelaksanaan *community development* yang diterapkan di Desa Alamendah melalui Pesantren Al Ittifaq yang berbasis agrobisnis, faktor penghambat dan pendorong mengenai *community development* di desa Alamendah tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Yayasan Al Ittifaq

Desa Alamendah terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1300-2350 mdpl, dengan luas 505.6 ha dan terdiri dari lima dusun. Pada setiap dusun terdapat lima hingga tujuh RW dengan total terdapat tiga puluh RW. Letak Desa Alamendah cukup strategis karena dilewati Jl. Ciwidey yang merupakan jalan propinsi. Orbitasi Jarak ke Ibukota Kecamatan 8 km, Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor 17 menit, Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan jalan kaki kendaraan non bermotor 1,53 jam, Jarak ke Ibukota Kabupaten 22 km, lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 47Menit, lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan jalan kaki kendaraan non bermotor 3,59 jam, jarak ke Ibukota Provinsi 53 km, lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 2 jam, lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten, dengan jalan kaki kendaraan non bermotor 8 jam.³⁸

Sejak tahun 1970 KH Fuad Affandi, mencoba untuk memadukan antara

kegiatan keagamaan dengan kegiatan usaha pertanian (agrobisnis) di pondok pesantrennya, sesuai dengan potensi alam yang ada di sekitar pesantren. Kegiatan usaha pertanian (agrobisnis) berlangsung hingga saat ini, bahkan menjadi tulang punggung kegiatan pesantren.

Dalam menjalani pendidikannya, santri Pondok Pesantren Al Ittifaq yang datang dari berbagai pelosok nusantara, yang mayoritas berasal dari golongan ekonomi rendah, fakir miskin dan anak yatim piatu, dan mereka sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan untuk keperluan makan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-harinya pun dipenuhi oleh pondok pesantren, hasil dari usaha pertanian yang dikelola oleh santri.

Dalam melaksanakan pengembangan Agrobisnis, pondok pesantren Al Ittifaq mendasarkannya kepada prinsip INPEKBI (Ilahi, Negeri, Pribadi, Ekonomi, Keluarga, Birahi, Ilmihi) yang artinya, bahwa dalam melaksanakan pengembangan Agrobisnis maka harus diridhoi oleh Allah SWT, diakui oleh pemerintah (negeri), berdasarkan atas kepribadian yang luhur, usaha secara ekonomis harus menghasilkan keuntungan. Serta kegiatan tersebut harus berdasarkan asas kekeluargaan, dan bila sudah dewasa santri siap untuk dinikahkan dan diberi tempat tinggal. Karena di pondok pesantren ini tidak ada batasan waktu bagi santri untuk berlatih dan mondok di pesantren Al Ittifaq ini, serta menerapkan ilmu atau teknologi yang berkembang untuk meningkatkan produksi.

Pondok pesantren Al Ittifaq dalam melaksanakan kegiatan agrobisnisnya melibatkan para santri. Sehingga para santri selain dibekali ilmu agama, juga dibekali ilmu agrobisnisnya. Oleh karena itu banyak alumni santri juga yang melakukan usaha pada bidang agrobisnis dan umumnya berhasil. Pondok pesantren Al Ittifaq saat ini merupakan tempat magang atau pelatihan agrobisnis dari santri-santri di luar daerah, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi,

³⁸ Profil Desa Alamedah Tahun 2016

dan petani dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri.

Community Development

Community development atau pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sebagai upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam upaya merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya (SDM) yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan berbagai elemen masyarakat baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari pemerintah kemudian juga diluar lembaga pemerintah seperti pondok pesantren Al Ittifaq yang mendorong terlaksananya program agrobisnis di desa Alamendah yang bekerjasama dengan santri dan masyarakat desa Alamendah yang bermanfaat bagi santri dan masyarakat.

Masyarakat diberdayakan dengan adanya lapangan pekerjaan mereka tidak menganggur misalnya diberdayakan oleh pesantren di budi daya, pengemasan dan pemasaran. Hampir tidak ada pengangguran dan hanya sedikit yang bekerja diluar desa/kota. Sampai sampai pihak kecamatan kebingungan untuk memberikan data jumlah pengangguran dikarenakan dilingkungan RW masing-masing hampir tidak ada yang menganggur.

Berdasarkan penjelasan diatas manfaat dari *community development* desa melalui pesantren agrobisnis disarakan oleh masyarakat, hampir seluruh masyarakat terberdayakan. Hal ini dirasakan juga manfaatnya oleh salah satu santri yang bernama Rahwan, tidak semua atau jarang ada pesantren berbasis Agrobisnis seperti ini. Terutama untuk di masyarakat jadi selain dari membantu orang-orang yang kurang mampu khususnya, dengan adanya pesantren berbasis Agrobisnis santri mempunyai pandangan kedepan untuk mandiri.

Hal senada juga dirasakan oleh Oom sebagai masyarakat dan juga petani yang merasakan manfaat dari *community development* desa melalui pesantren berbasis agrobisnis. Oom yang merupakan

masyarakat desa Alamendah yang mempunyai anak yang belajar di pesantren Al Ittifaq, merasakan manfaat dengan adanya pesantren berbasis agrobisnis karena anaknya seminggu sekali magang di gudang pengemasan pesantren melakukan sortasi sayuran untuk dikirim ke supermarket.

Dalam agrobisnis bisa memasok barang ke supermarket-supermarket merupakan hal yang dicapai seperti bisa bekerjasama dengan supermartket Hero di Jakarta, Griya di Bandung dan Super Indo di Bandung serta dengan Pasar Tradisional dan para pedagangnya pun bekerja sama dengan Pesantren Al Ittifaq. Kerjasama pun dilakukan dengan pemerintah dan pihak swasta seperti Bank Nasional Indonesia, tidak hanya kerjasama dengan pihak dalam negeri dengan pihak luar negeri pun bekerjasama, Pesantren Al Ittifaq sudah rutin bekerja sama dengan pihak Jepang dan Belanda dalam mengembangkan teknologi. Selain itu Pesantren Al Ittifaq banyak menerima penghargaan dari pemerintah dan instansi terkait dan menjadi Pesantren Al Ittifaq sebagai Pesantren percontohan dalam mengembangkan Agrobisnis di Indonesia. Hal yang dicapai yang paling penting dari pondok pesantren Al Ittifaq adalah santri dan masyarakat bisa merasakan kebermanfaatan pesantren agrobisnis ini dalam berbagai aspek seperti, aspek sosial, aspek infrastruktur, aspek ekonomi, dan aspek ekologi.

1. Aspek Sosial

Setiap hari ada 2 orang perwakilan dari 36 dewan kemakmuran mesjid secara bergantian untuk mengabdikan di pondok pesantren, setiap sebulan sekali ada pengajian intens dengan masyarakat, setiap bulan Rajab pondok pesantren mengadakan khitanan masal, menanggung biaya operasional santri yang tidak mampu dan menyediakan dana kematian untuk masyarakat.

Dari aspek sosial pesantren berperan dan hadir untuk menebar manfaat kepada masyarakat, hakikat dari capaian tujuan adanya pesantren agrobisnis ini adalah bagaimana pesantren bisa dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat termasuk gotong royong yang masih terpelihara di dalam masyarakat yang merupakan kontribusi dari keberadaan pesantren.

2. Aspek Infrastruktur

Pesantren dan masyarakat ikut andil dalam pembangunan fasilitas umum seperti, mesjid, jalan dan jika ada rumah warga yang kurang layak maka akan direnovasi oleh pesantren dan masyarakat. Pesantren dan masyarakat tidak tergantung kepada dana pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum.

Infrastruktur yang baik menunjukkan capaian yang sudah didapatkan oleh pesantren, apalagi jalan sebagai penunjang majunya ekonomi sebagai sarana untuk mendistribusi sayuran dan buah-buahan. Sarana prasarana yang dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan masjid merupakan kontribusi nyata dari pesantren dan masyarakat.

3. Aspek ekonomi

Meningkatnya perekonomian masyarakat dari hasil usaha Agrobisnis bisa dilihat dari segi fisik bangunan rumah, jalan dan apa yang mereka miliki. Banyak masyarakat yang pergi haji dan umroh hampir setiap tahun, bahkan ada yang kelihatan seperti orang yang tidak mampu tapi bisa pergi haji. Ada perbedaan pola ekonom kota dengan pola ekonom di kota kalau ukuran kesejahteraan ekonom di kota dengan ukuran rumah yang mewah, mobil bagus dan teknologi terbaru, ukuran di desa tidak seperti itu misalnya ukuran rumah layak itu tidak harus mentereng, apa yang masyarakat inginkan dengan bekerja keras yaitu karena ingin pergi haji. Jikalau punya uang dari sisa ladang, itu akan ditabungkan untuk kepentingan pergi haji. Kegiatan ekonominya itu digunakan untuk beribadah yaitu untuk bekal beribadah.

Selain adanya peningkatan ekonomi dari masyarakat tani, dampak peningkatan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berprofesi lainnya karena pesantren menjadi berbagai pusat pelatihan dan studi banding dari masyarakat luar kemudian dari aspek ekonomi sangat

menguntungkan masyarakat yang bekerjasama dengan pesantren yang ikut berdagang atau berjualan di pesantren sangat menguntungkan selanjutnya yang mempunyai penginapan juga menguntungkan.

Meningkatnya perekonomian masyarakat sudah terasa dengan adanya pesantren berbasis agribisnis, orientasi masyarakat dalam usaha agrobisnis semata mata hanya untuk beribadah yaitu mendapatkan bekal ibadah supaya bisa pergi berhaji. Hampir tidak ada yang menganggur di desa Alamendah karena masyarakat mempunyai lahan garapannya sendiri.

4. Aspek Ekologi

Pengejawantahan dari nilai-nilai yang ditanamkan pesantren kepada santri dan masyarakat di implementasikan pada kelestarian lingkungan bahwa tidak ada yang tidak bermanfaat semua bisa dimanfaatkan. Nilai yang ditanamkan yaitu jangan ada sehelai sampah yang ngawur. Secara ekologi kebiasaan masyarakat dulu kalau bahasa sekarang adalah pertanian terintegrasi, pertanian terpadu tetapi dari orangtua dulu masyarakat meyakini ketika bertani kita harus berternak karena untuk menjawab supaya tidak menghasilkan sampah dengan cara ketika bertani harus mempunyai ternak, sampah akan menjadi pakan ternak lalu dari ternak menghasilkan kotoran, kemudian kotoran ternak bisa diolah menjadi pupuk, pupuk untuk pertanian sehingga siklusnya berputar. Sebenarnya ini adalah *local genius* warisan leluhur desa Alamendah.

Pada tahap sortasi sayuran dan buah-buahan di kelaskan dalam beberapa grade dan mempunyai kegunaan masing-masing. Grade 1 untuk supermarket, grade 2 untuk supermarket, grade 3 untuk pasar tradisional, grade 4 untuk makanan sehari-hari, dan grade 5 untuk peternakan. Jikalau ada yang busuk atau tidak terpakai maka dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Timbulah moto jangan ada sehelai sampah yang ngawur, harus menciptakan segala sesuatu itu tidak batil harus bermanfaat sehingga kelestarian lingkungan terjaga.

Faktor Penghambat

Community development di desa Alamendah melalui pesantren berbasis Agrobisnis tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan. Faktor penghambat ini akan menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan dari *community development* yaitu memberdayakan individu-individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas melalui aspek ekonomi yaitu usaha agrobisnis.

Dulu ada sebagian kecil ketidaksetujuan masyarakat terhadap pesantren dalam mengembangkan agrobisnis tetapi sekarang sudah menyetujui semuanya karena dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam agrobisnis biasanya sering ada masalah dengan supermarket, misalnya dari potongan harga yang besar, orderan yang sedikit, sehingga tidak tertutup biaya *cost*. Selanjutnya ketika ada gagal panen di masyarakat dan ketika harga pasar sedang turun.

Dari penjelasan diatas dulu sempat ada sebagian kecil masyarakat tidak setuju dengan pesantren yang mengembangkan agrobisnis ini jelas jika tidak segera disikapi oleh pesantren akan menghambat pada pengembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam usaha Agrobisnis, karena peran partisipatif masyarakat menjadi kunci utama dalam *community development*. Pesantren melihat hambatan itu justru sebagai peluang.

Hambatan serta tantangan itu disikapi pihak pesantren sebagai peluang, karena kalau misalnya mengeluh dengan hambatan dan tantangan maka tidak ada keberlangsungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat membutuhkan proses untuk mengerti dan paham tentang maksud dari pesantren berbasis agrobisnis ini. Dalam menanggulangnya pesantren berbuat terus menjalankan usaha Agrobisnis bekerja sama dengan masyarakat, bagi sebagian kecil masyarakat yang tidak setuju dan belum bekerja sama dengan pesantren itu karena

pemahaman sebagian kecil masyarakat belum memahami maksud dari pengembangan sektor agrobisnis yang dilakukan oleh pesantren untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ketika sudah sampai kepada pemahaman itu maka sebagian kecil masyarakat akan mendukung jika terasa manfaatnya.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung ini adalah hal yang paling penting untuk berjalannya *community development* desa Alamendah melalui pesantren Al Ittifaq yang berbasis Agrobisnis bersama masyarakat dengan memecahkan masalah dan mengembangkan potensi yang ada di desa Alamendah. Serta peran dari pemerintah dan kerjasama dengan pihak swasta sehingga terbentuknya program dalam pengembangan usaha agrobisnis yang menjadikan program terlaksana sampai sekarang. *Pertama*, santri yang mengelola agrobisnis, *kedua*, kelompok tani atau masyarakat, *ketiga*, yang membantu segala permodalan seperti dari bank yaitu Bank Nasional Indonesia, *keempat*, dari dinas pertanian, dinas koperasi, dinas sosial, dan yang lainnya, mereka bekerjasama dengan pesantren mengadakan pelatihan-pelatihan untuk santri dan masyarakat.

Adanya kerjasama dari berbagai elemen menjadi salah satu faktor pendorong dalam *community development* desa Alamendah yang menjadi penentu keberlanjutan dari usaha agrobisnis. faktor pendorongannya adalah masyarakat kalau tidak ada masyarakat maka tidak akan ada kegiatan agrobisnis. Basisnya adalah *based on community*, faktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri, bahwa masyarakat itu tidak dijadikan objek dari pembangunan, tetapi melibatkan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek, inilah yang akhirnya menjadi faktor pendorong.

Partisipatif masyarakat ini merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan persoalan yang ada dilingkungan dalam hal ini di desa

Alamendah. Kewenangan ini berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan sebagai yang menerima hasil dari *community development* tersebut. Partisipatif masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih dalam suatu komunitas dan memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sehingga dari tingkat partisipatif masyarakat yang tinggi ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi juga menjadi subjek dalam pembangunan yang mana masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan pengendalian pembangunan maupun yang menerima pemanfaat hasil-hasil *community development* sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat upaya untuk meningkatkan pembangunan desa itu sendiri dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Alamendah.

Di samping faktor pendukung respon masyarakat yang baik dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi maka dibutuhkan sumber daya alam yang menunjang masyarakat desa alamendah dalam menciptakan suatu produk yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Maka sumber daya alam yang ada di desa alamendah adalah pertanian yang bisa menghasilkan sayuran-sayuran dan buah-buahan, melihat potensi ini pesantren bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait mengembangkan usaha agrobisnis.

Lokasi pesantren yang berada di dataran tinggi yang lahannya subur dan cocok untuk komoditas sayuran menjadi salah satu faktor pendorong yang dimiliki pondok pesantren. Selain itu lokasi pondok pesantren di topografi dataran tinggi yang merupakan salah satu sentra sayuran di wilayah Kabupaten Bandung membuat pondok pesantren dapat lebih dekat dengan pemasok dan pasar. Jarak pondok peantren ke Kota Kecamatan kurang lebih 7 KM, dan ke kota kabupaten kurang lebih 29 KM,

sedangkan ke kota provinsi (Bandung) kurang lebih 40 KM. hal ini memudahkan pondok pesantren dalam memperoleh sarana produksi serta memasarkan produknya ke Bandung dan Jakarta karena lokasi pondok pesantren yang dekat dengan sumberdaya produksi dan pasar sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Analisis Teori Struktur Fungsional

Mayarakat desa Alamendah mempunyai karakteristik masyarakat yang homogen, baik itu dari aspek mata pencaharian, sistem kepercayaan, bahasa dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Homogenitas sebagai ciri utama masyarakat desa memosisikan keberadaan masyarakat pada sistem tradisional. Gotong-royong, adat istiadat, kesenian-kesenian tradisional masih nampak dalam masyarakat desa. Untuk bertahan hidup, masyarakat desa memanfaatkan potensi alam sebagai pijakan sekaligus lahan garapan bagi memenuhi kebutuhannya. Mayoritas masyarakat desa Alamendah adalah petani yang berfokus pada sektor Agrobisnis.

Pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, dengan mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Pesantren Al Ittifaq merupakan lembaga yang ada di kampung Ciburial desa Alamendah kecamatan Rancabali kabupaten Bandung yang sangat berpotensi tidak hanya sebagai pelopor pembangunan masyarakat tetapi juga berpotensi untuk dapat berkembang dan dikembangkan sebagai pelaku ekonomi yang aktif dengan konsep kerjasama ini telah meramaikan dunia Agrobisnis di Indonesia.

Pendekatan struktur fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakat tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota

masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium.

Teori struktur fungsional dari Talcot Parson menekankan keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. *Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagaiannya tergantung satu sama lain dan bekerjasama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). *Functionalis* tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul.

Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. teori struktur fungsional dari Talcot Parson memiliki skema AGIL yaitu fungsi penting yang diperlukan semua sistem. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki fungsi ini.

Fungsi *adaptation* (adaptasi), yaitu sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Tahun 1934-1970 pesantren Al Ittifaq sistemnya masih salafiyah, yaitu kegiatannya hanya mengaji saja tidak ada kegiatan lain. Tahun 1970 pesantren Al Ittifaq di asuh oleh Fuad Affandi, kemudian berfikir tidak mungkin santri hanya mengaji saja pasti ada kegaitan kosong takutnya santri melakukan suatu hal yang negatif, maka kegiatan kosong itu diisi dengan kegiatan positif. Melihat potensi sekitar adalah pertanian maka diajarkanlah santri pertanian.

Harapan pihak pesantren jangan sampai ketika keluar dari pesantren Al Ittifaq santri bingung mencari pekerjaan atau istilahnya mereka bawa-bawa map melamar kesana kemari, atau mereka hanya bisa ngaji saja, mereka hanya bisa ceramah saja, kemudian efek dari sana mereka memasang tarif dan santri dituntut ketika terjun ke masyarakat tidak hanya memiliki

kemampuan di bidang agama saja tetapi memiliki kemampuan di bidang lainnya.

Pesantren beradaptasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dengan potensi sumber daya alam yaitu dari sektor Agrobisnis yang dikembangkan melalui kegiatan Agrobisnis yang dilakukan oleh para santri dan juga masyarakat yang mengelola Agrobisnis untuk keberlangsungan bersama pengembangan masyarakat.

Fungsi *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Selain membangun jiwa dan karakter kewirausahaan bagi santri untuk mencetak santri yang mandiri yang mempunyai keahlian setelah terjun di masyarakat, pesantren juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk beragrobisnis. Dalam memikat partisipatif masyarakat pesantren melakukan hal: *Pertama*, pesantren meyakinkan masyarakat bahwa pesantren memiliki pasar yaitu supermarket, harga jual pun dilebihkan oleh pesantren dibanding dengan menjual ke tengkulak. *Kedua*, jika pesantren sudah meyakinkan masyarakat untuk menjual hasil taninya ke pesantren maka pihak pesantren menggalangnya. *Ketiga*, jika masyarakat tidak memiliki modal untuk bertani, pesantren memberikan pinjaman modal untuk bertani. Berdasarkan wawancara dengan Pipin jika masyarakat menjual hasil tani melalui pesantren maka keuntungannya lebih besar di banding dengan menjual kepada tengkulak atau bandar.

Pesantren merancang sistem yang memikat partisipatif masyarakat dalam keberlangsungan agrobisnis untuk pengembangan masyarakat itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat tani dijawab oleh pesantren dengan tataniaga yang tidak panjang yang tidak mengakibatkan disparitas harga yang tinggi antara harga di hulu dan di hilir. Bekerjasama dengan pesantren merupakan keuntungan tersendiri untuk masyarakat tani karena tataniaga yang dilakukan tidak

panjang antara petani, pesantren dan supermarket.

Fungsi *integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi (A,G,L) dalam mengelola antarhubungan ketiga fungsi sistem pesantren yang menopang dalam integrasi: *pertama*, pesantren tidak ada batas dengan masyarakat, karena santri itu berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat, maka kami satukan santri dengan masyarakat supaya mudah untuk bersosialisasi. *Kedua*, masyarakat bisa pergunakan tenaga santri misalnya meminta bantuan untuk dilahannya seperti bertani dan membangun rumah. *Ketiga*, ketika ada acara atau kegiatan di pesantren seperti pengajian atau membangun pesantren tanpa disuruh masyarakat akan membantu karena gotong royongnya masih kuat. Pipin dalam wawancara mengatakan bahwa gotong royong masyarakat masih kuat apalagi ketika ada kegiatan pembangunan gedung ataupun kegiatan yang lainnya.

Gotong royong masih terjaga dilihat dari partisipasi masyarakat yang memberikan sumbangsih tenaga dan materi di setiap ada kegiatan yang diadakan pesantren. Dalam seminggu sekali ada pengajian di pesantren dengan masyarakat supaya masyarakat dididik hatinya, keagamaannya dan usahanya. Setiap satu bulan sekalipun ada pengajian di malam kamis kliwon dikumpulkan 36 dewan kemakmuran mesjid dari 30 RW di desa Alamendah dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan evaluasi jika ada permasalahan di kampung masing-masing atau keluarga atau usaha agrobisnisnya, pihak pesantren memfasilitasi masyarakat supaya menemukamkan solusi dari permasalahan bersama-sama.

Pesantren menjalankan peran sebagai pengatur dan mengelola antarbagian hubungan-hubungan dalam komponen (A,G,L) sehingga terciptanya integrasi antara ketiga komponen tersebut yang berimplikasi terhadap kerjasama antara pesantren, santri serta masyarakat dalam pengembangan

masyarakat berkelanjutan berbasis agrobisnis.

Fungsi *latency* (latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlangkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Dengan menyebarkan kultur(norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. Ada tiga nilai-nilai yang diterapkan pesantren kepada santri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu: *Pertama*, jangan ada sehelai sampah yang ngawur. *Kedua*, jangan ada sejengkal tanah yang tidur, *Ketiga* jangan ada sedetik waktu yang nganggur, timbulah moto pesantren untuk santri dan masyarakat, jangan ada sehelai sampah yang ngawur, maknanya menciptakan segala sesuatu itu tidak batil tidak ada yang sia-sia dengan memanfaatkan sampah menjadi pakan ternak dan pupuk kompos. Jangan ada sejengkal tanah yang tidur, maknanya tanah Indonesia luar biasa subur maka jangan sampai ada sejengkal tanah yang tidur, harus dimanfaatkan. Jangan sampai ada sedetik waktu yang nganggur, maknanya waktu itu adalah berharga bagaikan uang (*times is money*) harus di manfaatkan waktu sedetiknya supaya tercapai *baladatan toyibatun warobun gofur*.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa lahirnya moto karena adanya asas kemanfaatan dan moto yang merupakan nilai-nilai ini menjadi panduan untuk santri dan masyarakat. Ketika menjadi santri otomatis harus mengikuti sistem yang ada di pesantren.

Masyarakat yang ikut andil dalam kegiatan agrobisnis mempunyai motivasi dari dorongan penerapan nilai-nilai pesantren yang menjadi moto peesantren, dari hasil wawancara bersama salah satu masyarakat Agung Nugraha mengatakan bahwa motivasi mengikuti kegiatan agrobisnis adalah supaya mandiri dan mempunyai uang sendiri serta mempunyai cita cita yaitu menjadi pengusaha di bidang agrobisnis.

Pola-pola kultural yang dilakukan pesantren dengan menginternalisasikan nilai-nilai kepada santri dan masyarakat setidaknya ada makna tersirat untuk mengenalkan nilai dengan memotivasi aktor untuk bertindak. Selain nilai yang diterapkan pesantren ada seperangkat norma yang memotivasi aktor untuk bertindak yaitu, shalat, awal waktu, berjamaah dan di mesjid.

Berkembangnya pesantren agrobisnis ini melihat ketika suatu usaha tidak ada berkah pada tahun 1970 kemudian pada tahun 1990 mengkaji apa yang menjadi penyebabnya, pada tahun 1993 biasanya para petani melaksanakan ibadah dzuhur pada pukul 13.00 waktu Indonesia barat kemudian pihak pesantren mendapatkan petunjuk untuk merubah kebiasaan masyarakat melakukan ibadah shalat tepat waktu dan darisanalah kemajuan pesantren dirasakan, intinya yaitu sholat, awal waktu, berjamaah dan dilakukan di mesjid.

Menurut Parsons, terpentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial. sebenarnya sistem kultural berada di puncak sistem tindakan Parsons, dan menyebut dirinya "*determinis cultural*". Keberadaan kultural sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, sistem kultur telah menjadi 'ciri' bagi keberadaan suatu masyarakat maka dalam hal ini Parsons sangatlah manaruh perhatian penting sehingga ia beranggapan bahwa kultur berada pada posisi puncak suatu sistem tindakan.

Sistem adalah sebuah rel bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan budaya, lingkungan dan individu lain. Fungsi dari sistem sosial sendiri adalah untuk semua tindakan masyarakat. Dalam kaitannya dengan *community development desa melalui pesantren berbasis agrobisnis*, sub sistem Talcott Parson berada di posisi pemeliharaan pola, yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dengan adanya sistem atau aturan yang disandarkan pada petuah kiyai dari pesantren untuk menjaga keseimbangan

sosial maka ada pola-pola kultur yang perlu dijaga dan terus dilestarikan oleh para pewaris kedepannya yaitu shalat, awal waktu, berjamaah, di mesjid. Hal ini berkaitan agar nilai-nilai positif mampu dijaga dan terus disebarkan kepada semua umat manusia. Asas kemanfaatan itu dapat mereka rasakan dari tindakan mereka menjaga dan memelihara nilai kultur yang ada sebagai norma sosial di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian tentang *community development* desa Alamendah melalui pesantren agrobisnis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya pesantren berbasis agrobisnis mencoba untuk memadukan antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan agrobisnis di pondok pesantren, potensi alam yang ada di sekitar pesantren cocok untuk pertanian. Agrobisnis menjadi tulang punggung kegiatan pesantren.
2. *Community development* desa Alamendah melalui pesantren agrobisnis dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipatif masyarakat menjadi kunci utama untuk keberhasilan *community development* yang tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut, yaitu pelatihan, program sosial, pemberian modal, kelompok tani dan pendidikan pesantren.
3. Hasil yang dicapai *community development* desa Alamendah melalui pesantren agrobisnis adalah memasok barang ke supermarket, bekerjasama dengan pemerintah dan bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari beberapa aspek seperti: aspek sosial, aspek infrastruktur, aspek ekonomi, dan aspek ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar Jurnal Tiga Bulanan Cides. 1998. *Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: CIDES, Edisi Vol. V. No 2.
- Al-Qardhawi. 1999. *As-sunnah sebagai sumber IPTEK dan Peradaban*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- E. Sa'id, Gumbara & A. Harizt Intan. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fakih, Mansour. 1996. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Muhammad. 2012. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haedari, Amin. 2004. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD.
- Harsojo. 1988. *Pengantar Antropologi*, Bandung: Bina Cipta..
- <http://jpicsvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>
- <http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-goals-shift-byjeffrey-d-sachs-2015-03/indonesia>*The End Of Proverty.co*.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koentjoroningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Leibo, Jefta. 1986. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press.
- Mastuki dkk. 2005. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Meleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. and Rahman, M.T., 2010. *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Moh. 2012. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia.
- Poloma, M. Margaret. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Qomar, Mujamil. Tanpa Tahun. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlanga.
- Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sajogyo, Pudjiawati. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sajogyo, Pudjiawati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Salimuddin. 2002. *Studi Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan Analisis Manajemen Pesantren*. Bandung: Pustaka Billah.

- Satori, Djam'an. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekartawi. 2013. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, Idad. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Insan Mandi.
- Suharto, Edi. 2010. *CSR dan COMDEV; Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syukir, Asmuni. Tanpa Tahun. *Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Wirawan, B. 2013. *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Fuad Choirul. 2009. *Pesantren, Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi*. Jakarta: Labsosio Pusat Kajian Sosiologi.